

## **PENGUMUMAN**

**NOMOR : PENG- 01/PANSEL.JPT-P/07/2019**

### **TENTANG**

### **SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Panitia Seleksi mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN :**

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum (Eselon. IIa), sebanyak 1 (satu) orang.

**II. TUGAS POKOK JABATAN :**

Melaksanakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum serta memberikan keterangan ahli dalam proses hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan saran, rekomendasi, dan pendapat hukum yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**III. PERSYARATAN**

**A. UMUM :**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV), diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan Pasca Sarjana (S2);
4. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I (IV/b);
5. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar/deskripsi kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
6. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
7. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
8. Berusia paling tinggi 56 Tahun pada tanggal 31 Oktober 2019;
9. Sehat jasmani dan rohani;

10. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun.

**B. KHUSUS :**

1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan nilai SKP;
2. Memiliki izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagaimana pada lampiran II;
3. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat serta tidak dikenai sanksi pidana dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dinyatakan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Pejabat setingkat Eselon II yang membidangi kepegawaian dari Instansi masing-masing dibuktikan dengan Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran III;
4. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dibuktikan dengan Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran IV;
5. Memiliki sertifikat lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator;
6. Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**IV. TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN :**

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 22 Juli – 09 Agustus 2019;
  2. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman [rekutmen.lkpp.go.id](http://rekutmen.lkpp.go.id), dengan tahapan:
    - a. Membuat akun pada laman <https://rekutmen.lkpp.go.id/main/register> (bila belum mempunyai akun);
    - b. Periksa kotak masuk *email*, tautan link pendaftaran telah dikirimkan untuk validasi akun;
    - c. **Login**, kemudian lengkapi data diri yang wajib diisi pada menu profil sebagai berikut:
      1. Foto;
      2. Riwayat pangkat;
      3. Riwayat jabatan;
      4. Riwayat pendidikan.
    - d. Pada menu **seleksi**, pada kolom jabatan klik “**lihat**” untuk informasi lebih lanjut dan melakukan pendaftaran dengan mengklik tombol **daftar** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
- Catatan:
- Spesifikasi dokumen yang diunggah
- 1) Dokumen dalam bentuk gambar hasil scan dari dokumen asli;
  - 2) Ekstensi dokumen adalah :
    - a. \*.jpg atau \*.jpeg (maks. File 200 Kb);
    - b. \*.pdf (maks. File 2Mb)

- 3) Setiap dokumen harus terlihat dan atau terbaca jelas.

**V. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI :**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	22 Juli – 9 Agustus 2019
2	Pendaftaran Online	22 Juli – 9 Agustus 2019
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Agustus 2019
4	Asesmen Kompetensi	15 Agustus 2019
5	Tes Kesehatan dan Kejiwaan	19 Agustus 2019
6	Penulisan Makalah	20 Agustus 2019
7	Presentasi dan Wawancara	22 Agustus 2019
8	Pengumuman 3 (Tiga) Besar	05 September 2019

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.

**VI. KETENTUAN LAIN – LAIN :**

1. Dalam Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di LKPP, pelamar tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Ujian dilaksanakan di Jakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan kemudian melalui laman [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id) dan/atau <https://rekruitmen.lkpp.go.id>;
3. Pelamar bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri;
4. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
6. Apabila dalam proses seleksi diketahui bahwa pelamar memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di LKPP, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan pelamar tersebut;
7. Apabila pelamar diketahui memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi tersebut;
8. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui website [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id) dan/atau <https://rekruitmen.lkpp.go.id>. Pelamar diminta untuk aktif mengakses website, laman, dan email masing-masing Pelamar secara berkala;
9. Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atau informasi mengenai Pelamar yang dinyatakan

- lulus. Masukan tersebut dapat disampaikan dengan mengisi Formulir Permasalahan pada laman [rekutmen.lkpp.go.id](http://rekutmen.lkpp.go.id);
10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan mengikat;
  11. Alamat Sekretariat Panitia Seleksi :

Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian  
Gedung LKPP Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940  
Telp. 021-299 12 450



Jakarta, 22 Juli 2019  
Ketua Panitia Seleksi,

Ikak G. Patriastomo

Lampiran I Pengumuman

Nomor : PENG-01/PANSEL.JPT-P/07/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

DESKRIPSI JABATAN

NAMA JABATAN : DIREKTUR PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

ATASAN LANGSUNG : DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

TUGAS/MISI JABATAN : Melaksanakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum serta memberikan keterangan ahli dalam proses hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan saran, rekomendasi, dan pendapat hukum yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

URAIAN TUGAS

- : 1. Merumuskan dan menyusun strategi, kebijakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan saran, rekomendasi, dan pendapat hukum yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Merumuskan dan menyusun strategi, kebijakan pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa dalam perkara pidana umum dan korupsi, perdata, tata usaha negara serta persaingan usaha yang terkait dengan pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan rumusan pendapat hukum dan keterangan ahli yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melaksanakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka membantu pengelola pengadaan mengatasi permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa;
4. Melaksanakan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa dalam perkara pidana

umum dan korupsi, perdata, tata usaha negara serta persaingan usaha yang terkait dengan pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka membantu pengelola pengadaan dalam mengatasi permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa;

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil penanganan permasalahan hukum berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka memastikan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
6. Melaksanakan diseminasi penanganan permasalahan hukum berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penanganan permasalahan hukum pengadaan bagi pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan penyusunan kegiatan dan anggaran Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka memastikan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
9. Membina dan mengembangkan profesionalisme staf Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM;
10. Memberikan disposisi kepada bawahan berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Memberikan arahan kepada bawahan dalam rangka penyelesaian tugas Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum sesuai pedoman dan kebutuhan;
12. Memberikan saran dan usulan kepada pimpinan berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab;
13. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Direktorat

Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka melaksanakan fungsi akuntabilitas/pertanggungjawaban;

14. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi secara administrasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
15. Melaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pedoman dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi satuan organisasi; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan disposisi/arahan pimpinan berdasarkan pedoman dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Lampiran II Pengumuman

Nomor : PENG-01/PANSEL.JPT-P/07/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**SURAT IZIN/REKOMENDASI  
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi delegasi wewenang menyatakan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat (Gol.) :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

memenuhi persyaratan dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

..... , .....  
2019

Nama  
NIP



Lampiran III Pengumuman

Nomor : PENG-01/PANSEL.JPT-P/07/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol.) :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat, tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin serta tidak dikenai sanksi pidana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

Apabila keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,  
Pejabat Yang Berwenang

....., .....2019  
yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Lampiran IV Pengumuman

Nomor : PENG-01/PANSEL.JPT-P/07/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol.) :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik.

Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

..... ,  
.....2019

Materai 6000

Nama

NIP